

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Vera Ariska¹, Afif Khalid², Muthia Septarina³

1) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.18810236

2) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.0004085801

3) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1118098401

Email: veraariska0852@gmail.com

ABSTRAK

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini setidaknya menjadi titik terang untuk melindungi hak isteri dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap isteri.

Penelitian ini yakni penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif yakni metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Perlindungan hukum terhadap isteri secara jelas melindungi isteri. Perlindungan nyata diberikan kepada isteri melalui bantuan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian. bentuk perlindungan hukum bagi isteri meliputi hak-hak korban berupa perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus terkait Kerahasiaan korban, pendampingan pekerja sosial, pendampingan hukum dan pelayanan bimbingan rohani dan selama pemeriksaan di semua tingkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi pidana bagi pelaku diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelaku, namun sayangnya peraturan sanksi pidana dalam Undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini menganut sistem alternatif. Yang mana hakim belum tentu menjatuhkan putusan pidana penjara atau pidana denda dengan pengaturan pidana maksimal saja tanpa adanya pengaturan pidana minimal.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga , Sanksi pidana*

ABSTRACT

. With the enactment of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, this at least becomes a bright spot for protecting the rights of wives in preventing acts of violence against wives. This research focuses on two problem formulations, namely legal protection of wives as victims of physical violence in the household based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and criminal sanctions for perpetrators of violence against wives in the household.

This research is a normative legal research or literature. The normative legal research method is a method used in legal research conducted by examining existing library materials.

From this research, the result is that the legal protection of the wife clearly protects the wife. Real protection is given to the wife through legal assistance, non-governmental organizations as well as open and friendly acceptance from the police environment. forms of legal protection for wives include victims' rights in the form of protection from the family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions or other parties, either temporarily or based on a protection order from the court, health services in accordance with medical needs, special handling related Confidentiality of victims, assistance to social workers, legal assistance and spiritual guidance services and during examinations at all levels in accordance with statutory regulations. The imposition of criminal sanctions for perpetrators is expected to provide a deterrent effect for perpetrators, but unfortunately the criminal sanctions regulations in the Law on the Elimination of Domestic Violence adopt an alternative system. The judge does not necessarily impose a sentence of imprisonment or a fine with a maximum criminal setting without any minimum criminal arrangement.

Keywords : *Legal Protection, Domestic Physical Violence , Criminal sanctions*

- Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim , (2016), *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Depok : Prenada Media Group
- Mardjono Reksodiputro, (2007), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)
- Moerti Hadiati Soeroso, (2011), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta : Sinar
- Philipus M. Hadjon, (1989), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu,
- Rena Yulia, (2013), *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rika Saraswati, (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeryono Soekarto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Perss,
- Sugali, SH, MH., hukum pidana, ‘‘Perumusan Lamanya Sanksi Pidana’’
<https://sugalilawyer.com/perumusan-lamanya-sanksi-pidana/> . tanggal 12 Maret 2022
- Yayasan Jurnal Perempuan, (2002), *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, SMKG Desa Putra1